

157

Universitas Terbuka: Alternatif Baru Pendidikan Tinggi Kita

BABARI*

PENGANTAR

Setiap tahun ajaran baru lembaga pendidikan tinggi negeri selalu menghadapi masalah kecilnya daya tampung dibandingkan dengan jumlah lulusan SMTA yang ingin melanjutkan studinya. Universitas swasta pada umumnya menjadi pilihan kedua dari calon mahasiswa sebab biayanya mahal, kadang kala statusnya belum jelas, lamanya masa belajar belum pasti baik karena kurangnya tenaga dosen ataupun karena harus menempuh ujian negara lagi. Keadaan semacam ini menyebabkan lulusan SMTA dari keluarga yang status sosial ekonominya lemah dan tidak diterima di universitas/institut negeri tidak dapat melanjutkan studinya. Dan karena kesempatan kerja yang tersedia juga terbatas maka mereka terpaksa menganggur sambil menunggu kemungkinan untuk mengikuti lagi tes masuk universitas/institut negeri pada tahun ajaran berikutnya. Kondisi seperti ini akan menjadi suatu "lingkaran setan" yang terus berulang setiap tahun.

Menghadapi masalah seperti ini pemerintah sejak awal tahun 1980 telah mencoba mencari alternatif untuk memperluas daya tampung dan memperbesar kesempatan belajar di universitas/institut negeri bagi para lulusan SMTA yang ingin melanjutkan studinya. Alternatif yang ditemukan adalah melaksanakan Universitas Terbuka seperti yang telah dilakukan di beberapa negara lain. Mengingat sebagian besar masyarakat kita masih belum mengetahui tentang Universitas Terbuka ini maka tulisan ini disusun dengan tujuan membantu menjelaskan masalah Universitas Terbuka ini dan sekaligus sebagai *urun rembug* dengan pihak penyelenggara agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan maksud dari pembukaan Universitas Terbuka ini.

Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: "Sejak tahun ajaran 1984/1985 upaya perbaikan kurikulum secara terus-menerus tetap diadakan dengan bertitik tolak dan mengarah pada pemantapan usaha: (a) pengembangan kurikulum inti dan program khusus bagi kepentingan kelompok tertentu di masyarakat; (b) penerapan analisis sistem dalam penentuan bidang minat dan sasaran kurikulum; (c) pengwujudan asas keluwesan dalam isi kurikulum maupun pengelolaan proses belajar-mengajar dalam kerangka pengembangan pengajaran intra-kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra-kurikuler; (d) kemungkinan penyesuaian sistem dengan kecepatan belajar para siswa secara perorangan ataupun kelompok; (e) pendekatan program kepada ketuntasan belajar dalam masing-masing bagian maupun keseluruhan program kurikulum; (f) efisiensi proses belajar; (g) penerapan konsep berorientasi pada lapangan/bidang pekerjaan dalam kurikulum pendidikan kejuruan; (h) pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan."

PENJURUSAN

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada pertemuan dengan para pemimpin redaksi media massa ibukota (beberapa waktu yang lalu), menyatakan bahwa SMA Bahasa, IPA, dan IPS dihapuskan, sedangkan sekolah demikian yang tadinya berdiri sendiri dan berada di satu gedung, di gedung yang berdampingan, atau gedung yang berdekatan digabung menjadi satu SMA. SMA dengan kurikulum yang telah disempurnakan dan oleh sebab itu tidak lagi merupakan SMA Bahasa, IPA, dan IPS, dimungkinkan mengadakan berbagai program belajar, tidak saja untuk mempersiapkan anak didik yang memenuhi persyaratan tertentu buat pendidikan lanjutan di perguruan tinggi melainkan juga untuk mempersiapkan anak didik yang mempunyai bakat, minat dan tujuan lain buat pendidikan tambahan jenis lain maupun agar dapat bekerja di lapangan kerja.

Dari struktur program Kurikulum SMA 1984¹ yang telah diumumkan, terlihat bahwa terdapat empat paket program yang disediakan bagi mereka yang hendak melanjutkan studi ke perguruan tinggi, yaitu paket Ilmu-ilmu Fisik, paket Pengetahuan Budaya, paket Ilmu-ilmu Biologi, dan paket Ilmu-ilmu Sosial. Keempat paket ini menggambarkan gugus-gugus ilmu pengetahuan di perguruan tinggi. Dengan demikian, sejak SMA nasib seorang siswa telah ditentukan. Jalur mana di perguruan tinggi yang hendak ditempuh telah ditetapkan melalui pengambilan paket yang relevan. Melihat pembagian jam pelajaran pada setiap paket maka sangat kecil kemungkinan bagi seorang siswa SMA untuk mempersiapkan diri dalam lebih dari satu paket. Oleh ka-

¹Lihat *Kompas*, 19 Februari 1984.

rena itu, jelaslah bakal tak terjadi penghapusan jurusan di SMA, sebaliknya terjadi pemekaran jurusan dari 3 jurusan sekarang menjadi 4 jurusan.

Masalah yang dapat diproyeksikan sekarang ialah apakah sebuah SMA mampu menyediakan keempat paket itu dan apakah para siswa dapat terbagi secara agak merata ke dalam masing-masing paket. Kekurangmampuan sekolah dan kekurangmerataan penyebaran siswa akan mempengaruhi *enrolmen* di perguruan tinggi. Misalnya, kalau sekolah tak mampu menyediakan paket Pengetahuan Budaya karena kekurangan guru atau para siswa kurang berminat memilih paket ini, maka jelas akan mengurangi jumlah mahasiswa pada fakultas dan jurusan pengetahuan budaya di perguruan tinggi. Masalah ini sudah harus diproyeksikan guna membenahi penyaluran calon mahasiswa ke fakultas-fakultas atau jurusan-jurusan "kering" di perguruan tinggi. Penyusunan struktur program ke dalam empat paket itu seolah-olah kurang memperhitungkan kecenderungan minat kaum muda sekarang yang lebih tertarik untuk memilih jurusan eksakta daripada jurusan non-eksakta. Satu segi yang perlu diperhatikan pula ialah apakah para siswa yang telah memilih salah satu paket dijamin penerimaannya di perguruan tinggi. Jaminan itu ada jika tes seleksi masuk ke perguruan tinggi dihapuskan. Akan tetapi, meskipun tes itu dihapuskan apakah perguruan tinggi yang dituju mampu menampung lulusan SMA yang telah dipersiapkan dalam paket tertentu.

Selain menyediakan empat paket guna menyiapkan para siswa ke perguruan tinggi, setiap SMA diharapkan menyediakan paket-paket guna mempersiapkan para siswa yang ingin langsung bekerja setelah tamat SMA. Hal ini menuntut tersedianya jumlah guru yang jauh lebih banyak daripada yang dituntut oleh Kurikulum 1975. Jenis-jenis keahlian guru pun harus lebih bervariasi. Persoalannya ialah apakah lembaga pendidikan tenaga kependidikan, seperti IKIP, mampu mengejar pembaharuan yang dituntut oleh SMA ini.

Berdasarkan latar belakang pemikiran ini, penulis menyarankan prinsip keluwesan yang agak berbeda. Program inti seyogyanya dirancang guna memberikan kemampuan dasar sebagai persyaratan minimal bagi semua lulusan SMA untuk memasuki perguruan tinggi pada fakultas/jurusan mana saja. Program khusus hendaknya dirancang untuk memberikan bekal pengayaan bagi para siswa yang hendak memasuki perguruan tinggi sesuai dengan minat atau cita-citanya, sedangkan program khusus yang lain dirancang guna memberikan bekal persiapan bekerja bagi para siswa yang tak mampu/tak ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Dengan demikian, seorang siswa masih memiliki peluang untuk memilih fakultas/jurusan di perguruan tinggi yang tak termasuk prioritas pilihan pertamanya. Selain itu, seorang siswa yang mempersiapkan diri untuk bekerja masih dimungkinkan untuk melanjutkan studi-

nya ke perguruan tinggi setelah ia memiliki sumber nafkah sendiri guna membiayai kuliahnya. Wujud kurikulum semacam ini lebih sesuai dengan kondisi sekolah dewasa ini dan kemungkinan perkembangannya di masa mendatang. Prinsip mobilitas pendidikan dalam rangka pendidikan seumur hidup tetap terpelihara. Masa depan lulusan SMA cukup terbuka baik untuk masuk ke perguruan tinggi maupun untuk masuk ke lapangan kerja.

Bidang-bidang pelajaran mana saja yang seyogyanya dimasukkan ke dalam program inti sesuai dengan prinsip keluwesan yang disarankan itu? Bidang-bidang pelajaran itu tentu meliputi bidang-bidang pelajaran yang diwajibkan dalam GBHN, bidang-bidang pelajaran yang lebih memungkinkan siswa untuk meningkatkan dan mempertajam daya penalarannya dan kemampuan mengolah ilmu di perguruan tinggi, serta kemampuan mengembangkan pekerjaan/profesi yang dipilihnya. Dengan demikian, bidang-bidang pelajaran itu antara lain adalah matematika, biologi/fisika/kimia, bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya, serta ekonomi dan koperasi.

BEKAL UNTUK BEKERJA

Program khusus bagi para siswa yang hendak memasuki dunia kerja hendaknya dirancang tanpa membahayakan persatuan bangsa. Propinsialisme, daerahisme, bahkan sukuisme perlu dicegah. Tunjangan dari lingkungan perlu diperhitungkan, sehingga pada daerah pertanian disediakan paket ketrampilan pertanian, pada daerah nelayan disediakan paket ketrampilan perikanan, dan pada daerah industri disediakan paket ketrampilan industri.

Namun perlu dipertimbangkan strategi pembangunan yang menganut prinsip Wawasan Nusantara. Pada daerah nelayan yang telah padat penduduk, para siswa mungkin perlu dilatih dalam ketrampilan pertanian agar mereka telah siap jika terpaksa harus bertransmigrasi. Pada daerah pertanian yang kurang produktif para siswa perlu dilatih dalam ketrampilan kerajinan tangan untuk menggeserkan mata pencaharian penduduk di daerah itu. Pada daerah yang penduduknya belum mengenal cara membuat batik, sekolah bisa berinisiatif untuk melatih para siswa dalam kerajinan membatik sehingga lama-kelamaan dikenal penduduk.

Dengan kerajinan tersebut, sekolah mampu berperan sebagai transformator masyarakat sekitarnya. Dan jika program khusus ini direncanakan dan dilaksanakan secara tepat, maka penyesuaian tujuan dan struktur program dengan perkembangan masyarakat, pembangunan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dilakukan melalui arah yang benar.

BEBAN BELAJAR SISWA

Salah satu hasil penilaian Kurikulum 1975/1976/1977 menunjukkan bahwa materi kurikulum yang harus disampaikan kepada para siswa terlalu padat. Hal ini berarti beban belajar siswa sangat berat. Oleh karena itu, Kurikulum 1984 seyogyanya tidak mengulangi ketimpangan Kurikulum 1975/1976/1977 ini.

Di berbagai negara, terutama negara-negara maju, jumlah bidang studi relatif sedikit, sehingga para siswa benar-benar mampu menguasai apa yang diajarkan. Yang terpenting adalah bahwa siswa harus menguasai proses memperoleh pengetahuan dan bukan produk pengetahuan. Secara demikian seorang lulusan dibekali kemampuan untuk menambah dan memperdalam pengetahuan yang telah diperoleh di bangku sekolah.

Struktur program Kurikulum SMA 1984 menunjukkan bahwa jumlah bidang pelajaran masih terlalu banyak, yakni rata-rata 20. Kalau kecenderungan ini berlanjut terus maka dikhawatirkan bahwa ketimpangan Kurikulum 1975/1976/1977 yang telah diperlihatkan oleh hasil penilaian kurikulum bakal tidak dihindari atau dikurangi. Oleh karena itu, hal ini perlu dipertimbangkan dengan saksama sebelum kurikulum baru diberlakukan. Butir-butir Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai perbaikan kurikulum sebenarnya menghendaki penyederhanaan kurikulum dan pengurangan beban belajar yang terlalu memberatkan siswa.

LPTK DAN EKSPERIMENTASI

Banyak inovasi pendidikan di Indonesia dimulai dari sekolah-sekolah, sedangkan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) hanya mengikuti pembaharuan yang telah dirintis di sekolah. Dengan demikian, LPTK sering ketinggalan dalam mempersiapkan tenaga guru yang sesuai dengan tuntutan di lapangan.

Kenyataan ini tampaknya akan berlaku pula dengan Kurikulum 1984. Satu hal yang jelas ialah bahwa Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa mulai diajarkan sebagai bidang studi baru pada tahun ajaran 1984/1985. Produksi guru sejarah oleh jurusan sejarah pada LPTK sangat rendah sehingga banyak guru yang tidak berlatar belakang pendidikan sejarah terpaksa direkrut menjadi guru bidang studi ini setelah mengikuti penataran singkat. Penekanan yang diperkenalkan ke dalam bidang studi ini belum dikenal oleh LPTK sehingga lembaga ini ketinggalan satu langkah.

Oleh karena itu, berbagai inovasi yang dimasukkan ke sekolah melalui Kurikulum 1984 seyogyanya segera diperkenalkan kepada LPTK agar tidak tertinggal terlalu jauh. Di masa mendatang segala bentuk inovasi seharusnya diawali dari LPTK sehingga pembaharuan itu sendiri tidak selalu menimbulkan gejolak di lapangan.

Berbagai butir Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, terutama yang dikemukakan pada awal tulisan ini, menunjukkan bahwa sebenarnya beberapa hasil eksperimentasi melalui sekolah-sekolah PPSP di delapan IKIP hendak diterapkan ke dalam kurikulum baru ini. Hal ini menunjukkan bahwa suatu pembaharuan yang telah dieksperimentasi tak akan menimbulkan lebih banyak masalah daripada suatu pembaharuan yang dirancang tanpa uji coba dari belakang meja. Beberapa program uji coba melalui PPSP justru membuktikan bahwa beberapa hal baru belum relevan diterapkan dalam kondisi sekolah biasa. Upaya ini justru mencegah penetapan kebijaksanaan yang keliru dan hanya membawa dampak yang merugikan pendidikan.

Berdasarkan pemikiran ini, upaya eksperimentasi seyogyanya tetap dilanjutkan di masa mendatang. Suatu eksperimentasi yang telah selesai dapat saja dihentikan, tetapi eksperimentasi yang lain perlu dilakukan sesuai dengan proyeksi kebutuhan di masa mendatang. Oleh karena itu, pembaharuan kurikulum senantiasa harus ditunjang oleh berbagai bentuk upaya eksperimentasi. Jika tidak demikian, suatu kurikulum baru tidak akan memiliki dasar argumentasi yang kuat, dasar empirik yang meyakinkan, dan hanya layak disebut kurikulum hasil uji coba dari belakang meja. Kurikulum semacam ini hanya membawa beban tambahan bagi dunia pendidikan, para guru di lapangan, dan para pengelola pendidikan serta menyia-nyiaikan kesempatan generasi muda untuk berkembang.

KREATIVITAS GURU

Betapapun sempurnanya sebuah kurikulum tetapi tanpa ditunjang oleh korps guru yang berkemampuan tinggi, maka kurikulum itu tidak akan membawa perubahan-perubahan yang dikehendaki. Peningkatan kemampuan guru sangat dipengaruhi oleh faktor kreativitas guru. Oleh karena itu, kreativitas guru hendaknya diberi peluang untuk disalurkan agar lama-kelamaan dapat semakin meningkat.

Pendayagunaan kreativitas guru merupakan persoalan yang pelik di negara kita. Sistem pengembangan kurikulum pada khususnya dan sistem pengelolaan pendidikan pada umumnya bersifat sentralistis, sehingga berbagai hal diatur oleh Pusat. Akibatnya, masalah-masalah yang bersifat khusus bagi wilayah tertentu kurang tertampung dalam kebijaksanaan umum yang berskala

nasional. Sistem sentralisasi ini memang dilandasi oleh semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang senantiasa harus diperhitungkan dalam mengembangkan bangsa melalui sistem pendidikan. Namun keadaan ini tidak boleh dijadikan alasan untuk membatasi kreativitas para guru.

Dalam kerangka sentralisasi, selalu terdapat peluang untuk mendorong kreativitas para guru. Sisi ini adalah penting karena guru adalah faktor kunci keberhasilan pelaksanaan suatu kurikulum. Oleh sebab itu, kurikulum yang disusun dari Pusat hendaknya tidak terlalu mendetail dan tidak mengatur sampai pada segi-segi yang sangat operasional.

Dalam Kurikulum 1984, materi kurikulum hanya terdiri dari konsep-konsep esensial yang diambil baik dari Kurikulum 1975/1976/1977 maupun dari unsur-unsur baru. Kebijaksanaan ini perlu dilaksanakan secara konsekuen. Dalam kurikulum baru ini unsur metode, unsur sumber bahan dan alat, serta unsur evaluasi sebaiknya diserahkan dalam porsi yang lebih banyak kepada para guru di lapangan. Pengisian hal-hal yang lebih terperinci ke dalam garis-garis besar pedoman dari Pusat hendaknya dilakukan oleh para guru yang lebih mengenal kondisi lapangan, kondisi siswa, serta kondisi prasarana dan sarana yang tersedia.

Untuk meningkatkan kreativitas guru, satuan pelajaran yang dirasakan sebagai beban yang lebih bersifat administratif daripada kontributif terhadap situasi belajar-mengajar selama ini hendaknya tidak ditangani seolah-olah sebagai instruksi menteri yang menentukan konduite para guru. Maksud baik satuan pelajaran hendaknya dicapai tanpa sikap otoriter dari kepala sekolah, penilik, pengawas, dan pengelola pendidikan di kantor wilayah. Sebagai salah satu sarana petunjuk bagi para guru dalam mempersiapkan pelajaran, satuan pelajaran hendaknya tidak ditentukan secara kaku dari Pusat. Satuan pelajaran itu sendiri tidak perlu terlalu mendetail sehingga para guru hanya tinggal meniru atau bahkan membeli satuan pelajaran siap pakai yang disusun oleh kelompok guru tertentu.

Untuk menyalurkan dan meningkatkan kreativitas guru, sekolah sebagai lembaga dan guru sebagai pribadi seyogyanya didorong untuk membuat eksperimen terutama dalam proses belajar-mengajar. Prestasi sebuah eksperimen yang dilakukan seorang guru atau sebuah sekolah dengan sendirinya akan menarik perhatian guru-guru dan sekolah-sekolah yang lain, sehingga akan mendorong mereka untuk meniru prestasi rekannya atau bahkan merangsang kompetisi untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi.

Berkaitan dengan peluang eksperimen ini, penulisan buku-buku pelajaran dan buku-buku sumber yang lain lebih baik diserahkan kepada para guru di

lapangan. Mereka lebih mengenal daya serap, bahasa dan kebutuhan para siswa, serta sarana yang tersedia di sekolah. Ini menyangkut kebijaksanaan penulisan buku di masa mendatang.

PENGELOLAAN GURU

Pengelolaan guru terutama berkenaan dengan guru-guru Sekolah Dasar juga merupakan suatu masalah pelik dalam dunia pendidikan di tanah air kita. Korps guru sebaiknya dikelola di bawah satu tangan dengan garis komando tunggal. Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Sistem Pendidikan Nasional yang akan datang diharapkan dapat turut menunjang maksud ini.

Suatu sisi yang sangat sulit dalam kerangka pengelolaan guru ini ialah masalah kesejahteraan guru. Guru yang kurang sejahtera tidak mungkin akan melaksanakan kurikulum dengan baik. Oleh karena itu, kebijaksanaan pengelolaan guru di masa mendatang hendaknya diarahkan pada upaya untuk mencari jalan pemecahan guna menanggulangi masalah kesejahteraan guru yang sudah cukup berlarut-larut selama ini. Berkenaan dengan masalah perumahan, dalam kesempatan untuk mendapatkan fasilitas perumahan yang dibangun atas prakarsa pemerintah dan Bank Tabungan Negara para guru perlu lebih diperhatikan. Pengadaan dan pengelolaan koperasi para guru yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan guru perlu didorong dan diawasi. Sistem penghargaan atas dedikasi dan prestasi para guru perlu dibenahi agar mereka yang layak mendapatkan penghargaan dapat menikmati. Selain itu, perlu dipertimbangkan cara menghimpun dana kesejahteraan guru dalam skala wilayah dan skala nasional. Dana kesejahteraan guru ini dapat dikelola dengan menabung dana pada bank-bank yang terpercaya dan/atau menyalurkannya melalui mekanisme sertifikat Danareksa yang sedang digalakkan pemerintah. Dalam hal ini, dana itu tentu tidak bersifat pribadi melainkan merupakan dana bersama milik para guru sebagai kelompok. Dana kesejahteraan ini dapat dikumpulkan melalui pengalihan persentase tertentu dari SPP para murid, sumbangan dunia usaha, dan sumbangan masyarakat pada umumnya. Bunga atau dividen dari modal yang ditabung ini secara bertahap dan berdasarkan skala prioritas dapat dimanfaatkan untuk memberikan tunjangan tambahan bagi para guru. Tunjangan ini dapat membantu meningkatkan penghasilan guru agar mereka mampu mempertahankan standar kehidupan yang layak bagi keluarganya. Dengan demikian, prestise guru tidak semakin merosot dari hari ke hari.

KEPALA SEKOLAH

Peranan kepala sekolah merupakan faktor penentu terlaksananya proses belajar-mengajar. Kepala sekolah adalah pemimpin staf guru dari jam ke jam dan dari hari ke hari. Kreativitas para guru akan terhambat jika kepala sekolah tidak terbuka terhadap pembaharuan. Betapapun sempurnanya suatu kurikulum, tetapi jika kepala sekolah tidak bersifat inovatif, maka kurikulum hanya dilaksanakan ala-kadarnya tanpa semangat yang diperlukan untuk mempertahankan momentum pelaksanaan kurikulum.

Oleh sebab itu, sistem senioritas dalam pengangkatan kepala sekolah perlu ditinjau lagi. Dalam sistem seperti ini, seorang kepala sekolah yang telah diangkat dapat bertahan sampai tiba waktu pensiunnya, kecuali jika ia dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Sistem pengangkatan dekan pada fakultas di perguruan tinggi sebenarnya bisa diterapkan pada sekolah dasar dan menengah. Seorang dekan yang tidak dipilih lagi oleh staf dosen menjadi orang biasa atau dosen biasa tanpa merasa gengsinya menurun. Oleh karena itu, sistem bergilir untuk menjadi kepala sekolah perlu diterapkan berdasarkan pemilihan staf guru seluruhnya. Dengan demikian, para guru diberi kesempatan untuk melatih diri dalam segi kepemimpinan, tanggung jawab, inisiatif dan kreativitas, serta pengenalan dan penghayatan suka-duka sebagai kepala sekolah. Melalui cara ini, semangat dalam mengelola sekolah dapat dipertahankan, sebab seorang yang terlalu lama menjabat sebagai kepala sekolah lama-kelamaan bisa kehilangan visi yang baru dan segar.

PENILIK DAN PENGAWAS

Penilik untuk Sekolah Dasar dan pengawas untuk Sekolah Menengah merupakan satu faktor penentu kelancaran pelaksanaan kurikulum. Mereka adalah pengawas yang berfungsi untuk membantu para guru guna meningkatkan kegiatan belajar-mengajar.

Di negara-negara maju peranan supervisor telah terbukti sangat menentukan dalam meningkatkan kualitas sekolah, kualitas lulusan, melalui program bantuannya bagi para guru. Di negara kita tradisi inspeksi yang panjang belum dapat diubah ke arah kegiatan supervisi yang benar-benar berorientasi pada peningkatan kemampuan profesi mengajar.

Pada waktu mendatang kebijaksanaan supervisi melalui peranan penilik dan pengawas ini perlu lebih diperhatikan. Jumlahnya yang sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah guru yang amat banyak dan tersebar sampai ke pelosok tanah air menghambat kelancaran program supervisi yang sebenar-

nya. Para pengawas di kantor wilayah perlu disebarakan sampai ke tingkat yang lebih bawah agar mereka mampu memonitor apa yang sebenarnya terjadi dalam ruang-ruang kelas.

Para penilik dan pengawas adalah perantara para guru dan kepala sekolah di satu pihak dengan para pengelola pendidikan di kantor-kantor pendidikan di pihak lain. Aspirasi dari bawah yang berasal dari sekolah dapat diserasikan dengan tuntutan dari atas yang berasal dari pengelola pendidikan oleh para penilik dan pengawas. Mereka berperan sebagai "penyambung lidah" para guru dan kepala sekolah sekaligus motivator kebijaksanaan dari atas. Selain itu, mereka berperan sebagai wadah penyalur berbagai pembaharuan dalam lingkungan pendidikan khususnya dan lingkungan masyarakat umumnya.

Untuk meningkatkan kualitas guru, para penilik dan pengawas hendaknya mendayagunakan berbagai kemungkinan yang ada. Mereka dapat membantu para guru dengan memperkenalkan buku-buku baru yang bermanfaat bagi proses belajar-mengajar, mengusahakan kelancaran penyaluran buku-buku perpustakaan ke sekolah, menyampaikan pesan-pesan kependidikan melalui buletin supervisi, dan mencari jalan keluar agar sekolah mampu berlangganan majalah-majalah ilmiah dan surat kabar. Selain itu, mereka bisa mengusulkan para guru yang potensial untuk mendapatkan tugas belajar pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan di dalam negeri dan bila perlu di luar negeri.

Yang terpenting adalah bahwa mereka dapat membagi waktu untuk mengunjungi sekolah secara periodik. Melalui kunjungan seperti ini, mereka diharapkan mampu mendeteksi kebutuhan dan harapan para guru serta permasalahan yang menyangkut situasi riil proses belajar-mengajar.

LEMBAGA PENGEMBANGAN KURIKULUM

Di berbagai negara maju, lembaga pengembangan kurikulum dalam skala nasional berdiri sendiri dan langsung bertanggung jawab kepada menteri pendidikan. Lembaga pengembangan kurikulum ini memiliki perangkat keras yang diperlukan, staf yang memiliki kualifikasi yang beraneka ragam dan keleluasaan untuk mengadakan uji coba kurikulum sebelum diterapkan secara nasional.

Di negara kita, Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan merupakan salah satu pusat dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu direktorat-direktorat dan kantor wilayah memiliki bagian atau seksi kurikulum. Penilaian kurikulum dan pelaksanaan uji coba diadakan secara pe-

riodik untuk menyusun suatu kurikulum baru. Dengan memperkirakan beban tugas di masa yang akan datang, sejak sekarang perlu dirintis peningkatan Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan untuk menjadi satu lembaga yang berdiri sendiri dan langsung bertanggung jawab kepada menteri.

Kemudian lembaga pengembangan kurikulum ini diharapkan mampu menjangkau pengembangan kurikulum dari berbagai jenis dan jenjang pendidikan, termasuk kurikulum perguruan tinggi. Dengan demikian, secara nasional terdapat satu penanggung jawab pengembangan kurikulum dalam pengambilan kebijaksanaan pengembangan kurikulum secara menyeluruh. Bagian atau seksi kurikulum yang tersebar di berbagai direktorat dan kantor wilayah merupakan aparat yang bertanggung jawab dalam menjabarkan kebijaksanaan yang bersifat umum dari lembaga pengembangan kurikulum dan mempersiapkan aspek-aspek teknis pelaksanaan kurikulum di sekolah-sekolah. Dengan demikian, pengembangan dan pelaksanaan kurikulum dapat ditangani sebagai satu sistem yang serasi dan terpadu.

PERUNDANG-UNDANGAN PENDIDIKAN

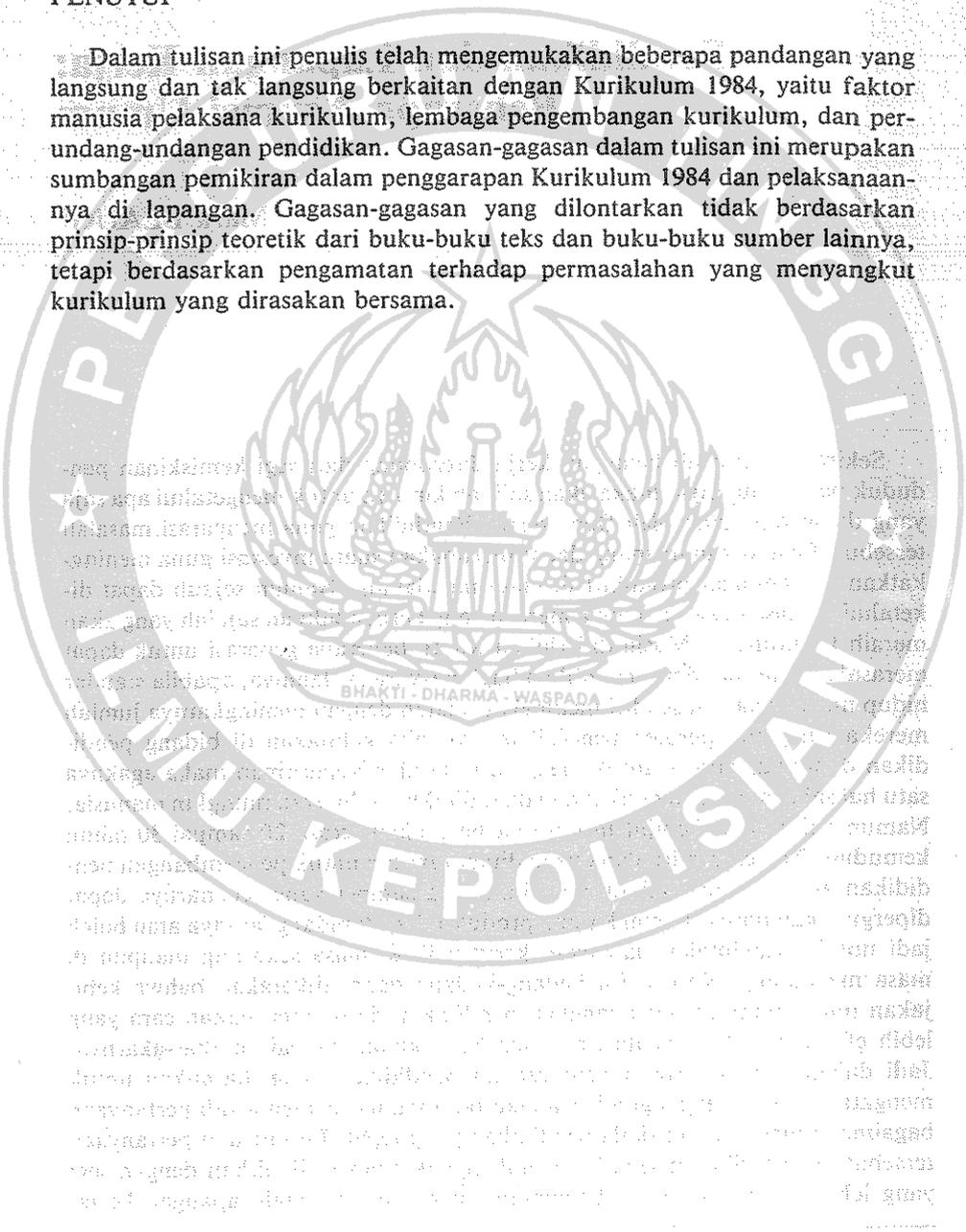
Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Sistem Pendidikan Nasional akan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan diharapkan dalam tahun 1984 ini kita telah memiliki satu Undang-Undang Pokok Pendidikan. Undang-Undang ini akan menjadi payung untuk Undang-Undang Organik yang lain, seperti Undang-Undang Wajib Belajar, Undang-Undang Pendidikan Dasar, Undang-Undang Pendidikan Menengah, Undang-Undang Pendidikan Kejuruan, dan Undang-Undang Perguruan Tinggi.

Maka hak dan kewajiban masyarakat dalam membangun sekolah diharapkan dapat diatur secara jelas, sehingga masyarakat tidak dirugikan dalam pendidikan anak-anaknya. Melalui mekanisme hukum ini, berbagai kebijaksanaan pendidikan diharapkan dapat ditampung secara tepat sehingga tidak terlalu sering terjadi perubahan kebijaksanaan pendidikan secara mendasar yang menimbulkan gejolak dalam masyarakat.

Payung kebijaksanaan yang menyangkut kurikulum ini juga diharapkan dapat diwadahi, sehingga pengembangan dan pembinaan kurikulum tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Kebijaksanaan strategik dalam pengembangan kurikulum seyogyanya tertampung dalam perangkat hukum ini, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang lebih operasional dalam jangka waktu pendek dapat dijabarkan dari ketentuan-ketentuan strategik yang berlaku dalam jangka waktu yang lebih panjang.

PENUTUP

Dalam tulisan ini penulis telah mengemukakan beberapa pandangan yang langsung dan tak langsung berkaitan dengan Kurikulum 1984, yaitu faktor manusia pelaksana kurikulum, lembaga pengembangan kurikulum, dan perundang-undangan pendidikan. Gagasan-gagasan dalam tulisan ini merupakan sumbangan pemikiran dalam penggarapan Kurikulum 1984 dan pelaksanaannya di lapangan. Gagasan-gagasan yang dilontarkan tidak berdasarkan prinsip-prinsip teoretik dari buku-buku teks dan buku-buku sumber lainnya, tetapi berdasarkan pengamatan terhadap permasalahan yang menyangkut kurikulum yang dirasakan bersama.



159

Pendidikan dan Lapangan Kerja: Beberapa Asumsi Umum

Mark BLAUG*

Sekiranya masalah lapangan kerja diteropong dari segi kemiskinan penduduk pada umumnya, maka akan sulitlah kiranya untuk mengetahui apa saja yang dapat diperbuat oleh Departemen Pendidikan guna mengatasi masalah tersebut. Pendidikan memang dapat merupakan suatu investasi guna meningkatkan kemampuan produktif di masa mendatang. Namun sejauh dapat diketahui di masa dekat ini hanya mereka yang berpendidikan sajalah yang akan meraih keuntungan. Masih diperlukan waktu beberapa generasi untuk dapat merasakan manfaat dari pendidikan bagi masyarakat lainnya, apabila standar hidup masyarakat itu sendiri meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah mereka yang memperoleh pendidikan. Apabila kebijakan di bidang pendidikan dijadikan sarana untuk mengatasi masalah kemiskinan maka agaknya satu hal saja yang perlu dilakukan ialah: didiklah sebanyak mungkin manusia. Namun akibat dari kebijakan tersebut baru akan terasa 20 sampai 30 tahun kemudian. Sementara itu dana yang dimanfaatkan untuk pengembangan pendidikan akan terlebih dahulu menyita aneka sumber yang sebenarnya dapat dipergunakan untuk meningkatkan produktivitas di bidang lainnya atau boleh jadi untuk menciptakan lapangan kerja baik di masa sekarang maupun di masa mendatang. Karena itu kadang-kadang dapat dikatakan bahwa kebijakan untuk tidak mengembangkan pendidikan dapat merupakan cara yang lebih efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan sampai ke akar-akarnya. Jadi dalam arti luas suatu perencanaan pendidikan yang diarahkan untuk mengatasi masalah lapangan kerja mau tak mau harus menjawab pertanyaan bagaimana menentukan skala pendidikan yang tepat. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kelihatan semakin membengkak apabila dikaitkan dengan segi yang lebih sempit lagi ialah bagaimana mengatasi masalah lapangan kerja.

*Saduran tulisan Mark BLAUG dalam *The Education Dilemma, Policy Issues for Developing Countries in the 1980's*, John Simmons (ed.). The World Bank